



LAPORAN KEUANGAN

SEMESTER I

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu pelaksanaannya adalah dengan Menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Diklat Hukum Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Semarang, 30 Juni 2025

Kepala,



Rinto Gunawan Sitorus, SH., MH.
NIP 198208292008011001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan Laporan Keuangan	v
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	23
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Perubahan Ekuitas	36
F. Pengungkapan Penting Lainnya	39
VI. Lampiran dan Daftar	40

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, 30 Juni 2025

Kepala,



Rinto Gunawan Sitorus, SH., MH.
NIP 198208292008011001

Laporan Keuangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah Semester I tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode sampai dengan 30 Juni 2025. Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 15.244.268,-. Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 3.822.738.113,- atau mencapai 15,07% dari Pagu Anggaran sebesar Rp 25,358,575,000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025. Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 369.899.313.915,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 59.620.300,- ; Aset Tetap (netto) sebesar Rp 369.827.256.115,- ; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp 12.437.500,-. Nilai Kewajiban sebesar Rp 233.899.580,- dan Ekuitas sebesar Rp 369.665.41.335,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 3.539.400,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 4.982.087.466,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 4.978.548.066,-. Surplus Pelepasan Aset Non Lancar Rp

o,- Surplus Kegiatan Non Operasional lainnya Rp 11,704,868,- sehingga surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp 11,704,868,- Pada Semester I Tahun 2025 entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp 4.966.843.198,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 369.665.414.335,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp 3,785,162,049,- kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp 4.966.843.198,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 374.632.257.533,- sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp 369.665.414.335,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	Th 2025				Th 2024 Realisasi
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Di Bawah)	%	
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1	-	-	-		-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	-	15.244.268	15.244.268		-
Jumlah Pendapatan dan Hibah		-	15.244.268	15.244.268		-
Belanja	B.2	25.358.575.000	3.822.738.113	21.316.759.117	15,07	-
Belanja Pegawai	B.3	1.952.506.000	1.014.234.250	837.918.143	51,95	-
Belanja Barang	B.4	18.617.069.000	2.633.458.863	15.864.885.974	14,15	-
Belanja Modal	B.5	4.789.000.000	175.045.000	4.613.955.000	3,66	-
Jumlah Belanja		25.358.575.000	3.822.738.113	21.316.759.117	15,07	-

II. NERACA

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH NERACA PER 30 JUNI 2025

(DalamRupiah)

Uraian	Cat.	2025	2024
Aset			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	48.000.000	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	-	-
Persediaan	C.1.3	11.620.300	-
Jumlah Aset Lancar		59.620.300	-
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2.1	323.737.178.000	-
Peralatan dan Mesin	C.2.2	8.217.565.811	-
Gedung dan Bangunan	C.2.3	48.900.340.295	-
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	7.983.150	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.5	-	-
Akumulasi Penyusutan	C.2.6	(11.035.811.141)	-
Jumlah Aset Tetap		369.827.256.115	-
Aset Lainnya	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	140.750.000	-
Aset Lain-lain	C.3.2	39.105.126	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(167.417.626)	-
Jumlah Aset Lainnya		12.437.500	-
Jumlah Aset		369.899.313.915	-
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	185.899.580	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.2	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.4.3	48.000.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		233.899.580	-
Jumlah Kewajiban		233.899.580	-
Ekuitas			
Ekuitas	C.5	369.665.414.335	-
Jumlah Ekuitas		369.665.414.335	-
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		369.899.313.915	-

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	2025	2024
Kegiatan Operasional			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1		
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.1	3.539.400	-
Jumlah Pendapatan		3.539.400	-
Beban Operasional	D.2		
Beban Pegawai	D.2.1	1.102.483.830	-
Beban Persediaan	D.2.2	53.048.140	-
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	1.833.508.937	-
Beban Pemeliharaan	D.2.4	291.894.723	-
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	519.470.687	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.6	1.181.681.149	-
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	D.2.7	-	-
Jumlah Beban		4.982.087.466	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		4.966.843.198	-
Kegiatan Non Operasional	D.3		
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lain		11.704.868	-
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		11.704.868	-
Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa		4.966.843.198	-
Pos Luar Biasa			
Beban Luar Biasa		-	-
Pos Luar Biasa		-	-
Surplus/Defisit - LO		4.966.843.198	-

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	2025	2024
Ekuitas Awal	E.1		-
Surplus/Defisit - LO	E.2	(4.966.843.198)	-
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas			
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi		-	-
Transaksi Antar Entitas	E.5	374.632.257.533	-
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E.6	369.665.414.335	-
Ekuitas Akhir		369.665.414.335	-

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Rencana Strategis

*Profil dan
Rencana
Strategis*

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah sebagai satuan kerja dibawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum, bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum. Adapun wilayah kerjanya mencakup di 11 Provinsi, yaitu Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum hadir untuk menjembatani dan memfasilitasi kebutuhan Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan Pendidikan serta pelatihan di bidang Hukum, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Menyusun rencana, program dan anggaran pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum;
2. Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum;
3. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum;
4. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai pendidikan dan Pelatihan Hukum; dan

-
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun 2025 ini merupakan laporan Semester I yang dikelola oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) modul GLP, Aset Tetap dan persediaan. SAKTI modul GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SAKTI modul aset tetap dan persediaan adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh aset dan persediaan yang dikelola Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dibawah Unit Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Per 30 Juni 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA (1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO (2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut

disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul

hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

-
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
 - Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016, sebagai berikut:
- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa

koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Kebijakan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:
 - 1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/ Daerah.
 - 2) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilaiwajarnya, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) BMN berupa aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK06/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset Tetap: a. Tanah, b. Gedung dan bangunan, dan c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi: 1) Jalan dan Jembatan 2) Bangunan Air Pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2025. Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali BMN juga dilaksanakan terhadap Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga). Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S761/MK.06/2020 tanggal 14 September 2020 hal Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, pelaksanaan Penilaian Kembali BMN

dilakukan setelah pencaangan pada tanggal 29 Agustus 2017. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. *Penyusutan Aset Tetap*

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. *Piutang Jangka Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang

dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. *Aset Lainnya*

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2020 tentang perubahan atas KMK Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban

jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 15.244.268,-
Rp 15.244.268,- Pendapatan Bukan Pajak disini merupakan Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Balai Diklat Hukum Jawa Tengah serta Penerimaan kembalikan Belanja Barang Tahun Anggaran yang lalu.

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Realisasi Belanja instansi pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 3.822.738.113,- atau 15,07% dari anggaran belanja Rp 25,358,575,000,- terdapat Blokir Efisiensi Anggaran sebesar Rp 16,553,385,000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

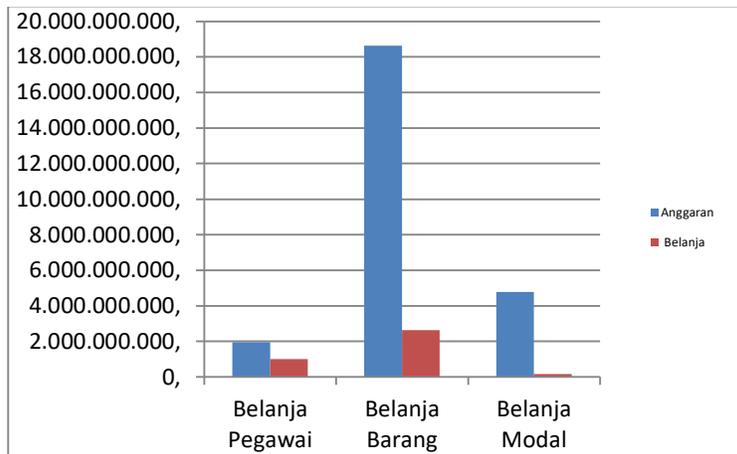
Tabel 1

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	1.952.506.000	1.014.234.250	51,95
Belanja Barang	18.617.069.000	2.633.458.863	14,15
Belanja Modal	4.789.000.000	175.045.000	3,66
Jumlah	25.358.575.000	3.822.738.113	15,07

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 1



Perbandingan realisasi anggaran dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Perbandingan Realisasi Belanja 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Belanja Pegawai	1.014.234.250	778.776.605	30,23
Belanja Barang	2.633.458.863	3.562.021.432	(26,07)
Belanja Modal	175.045.000	85.150.000	105,57
Jumlah	3.822.738.113	4.425.948.037	(13,63)

Realisasi belanja secara keseluruhan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 13,63%.

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp 1.952.506.000,-

Realisasi Belanja Pegawai Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.014.234.250,- dan Rp 778.776.605,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Realisasi belanja pegawai 30 Juni 2025 mengalami peningkatan sebesar 30,23% persen

dari TA 2024. Adapun Rincian Belanja Pegawai dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3
Realisasi Belanja Pegawai 2025

URAIAN	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.248.306.000	751.882.700	60,23
Belanja Pembulatan Gaji Pokok PNS	20.000	11.956	59,78
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	78.491.000	45.678.150	58,20
Belanja Tunjangan Anak PNS	26.028.000	15.861.860	60,94
Belanja Tunjangan Struktural PNS	40.320.000	23.040.000	57,14
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	39.872.000	20.864.000	52,33
Belanja Tunjangan PPH PNS	9.922.000	8.641.964	87,10
Belanja Tunj. Beras PNS	67.568.000	40.627.620	60,13
Belanja Uang Makan PNS	235.224.000	80.056.000	34,03
Belanja Tunjangan Umum PNS	43.210.000	27.570.000	63,80
Belanja Uang Lembur PNS	49.545.000	-	0,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	93.000.000	-	0,00
Belanja Uang Makan PPPK	21.000.000	-	0,00
Jumlah Belanja	1.952.506.000	1.014.234.250	51,95

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang

Rp 18.617.069.000,-

Realisasi Belanja Barang Juni 2025 dan 2024 Adalah Masing-Masing Sebesar Rp 2.633.458.863,- dan Rp 3.562.021.432,-. Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2025 Mengalami penurunan sebesar 26,07% dari Realisasi Belanja Barang TA 2024. Rincian Realisasi Belanja Barang disajikan didalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Realisasi Belanja Barang 2025

URAIAN	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang Operasional	1.725.360.000	770.612.665	44,66
Belanja Barang Non Operasional	4.380.111.000	523.407.097	11,95
Belanja Barang Persediaan	73.000.000	49.193.475	67,39
Belanja Jasa	4.042.800.000	473.739.631	11,72
Belanja Pemeliharaan	659.250.000	297.035.308	45,06
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	7.736.548.000	519.470.687	6,71
Jumlah Belanja	18.617.069.000	2.633.458.863	14,15

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal

Rp 4.789.000.000,-

Realisasi Belanja Modal Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 175.045.000,- dan Rp 85.150.000,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 6
Realisasi Belanja Modal 2025

URAIAN	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	316.668.000	175.045.000	55,28
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.472.332.000	0	-
Belanja Modal Lainnya	0	0	
Jumlah Belanja	4.789.000.000	175.045.000	55,28

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas Di bendahara Pengeluaran Rp 48,000,000,- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 48,000,000,-. Kas di Bendahara Pengeluaran ini merupakan Uang Persediaan di Balai Diklat Hukum Jawa Tengah.

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp 0,- Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0,-. Tidak ada Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

C.1.3 Persediaan

Persediaan Rp 10.334.380,- Nilai Persediaan per 31 Januari 2025 Dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 11.620.300,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.2 Aset Tetap

C.2.1 Tanah

Tanah Rp 323.737.178.000,- Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah per 31 Januari 2025 Dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 323.737.178.000,-

Tabel 8
Mutasi Tanah 2025

URAIAN	Realisasi
Nilai Tanah 30 Juni 2025	323.737.178.000
Mutasi tambah :	
Mutasi Tambah	0
Mutasi kurang :	
Mutasi Kurang	0
Nilai Tanah per 30 Juni 2025	323.737.178.000

Tidak ada Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tanah sehingga nilai per 30 Juni 2025 sebesar Rp 323.737.178.000,-

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per Januari 2025 dan Juni 2025 adalah Rp 0,- dan Rp 8.217.565.811,-. Saldo *Peralatan dan Mesin* pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 8.217.565.811,- dengan rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

(1) Alat Bantu

Saldo Alat Bantu (3.01) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 569.245.000,-

(2) Alat Angkutan Darat Bermotor

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 641.150.000,-

(3) Alat Bengkel Tak Bermesin

Saldo Alat Bengkel Tak Bermesin (3.02.02) pada laporan barang pengguna satker Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp

6.980.000,-

(4) Alat Pengolahan

Saldo alat pengolahan (3.04) pada per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 1.232.000,-

(5) Alat kantor dan Alat Rumah Tangga

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) pada Laporan Barang per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 5.338.142.301,-

(6) Alat Studio dan Komunikasi

Saldo Alat Studio dan Komunikasi (3.06) pada Laporan Barang Kuasa Penggun per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 234.313.250,-

(7) Alat kedokteran

Saldo Alat Kedokteran (3.07) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 18.068.858,-

(8) Komputer

Saldo Alat Komputer (3.10) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 1.478.405.490,-

(9) Peralatan Olahraga

Saldo Peralatan Olahraga (3.19) per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 201.841.200,-

(10) Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin.

Total Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 6.111.322.822,-.

Tabel 9
Mutasi Peralatan dan Mesin 2025

URAIAN	Realisasi
Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Januari 2025	0
Mutasi tambah :	8.217.565.811
Pembelian	175.045.000
Perolehan lainnya	0
Mutasi kurang :	0
Reklase Keluar Lemari Penyimpan	0
Saldo per 30 Juni 2025	8.217.565.811
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.793.629.486)
Nilai Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025	1.423.936.325

Mutasi Tambah pembelian di Peralatan dan Mesin berupa pembelian Pintu Elektrik (yang Memakai Akses), Lampu Penerangan Jalan, Meja Kerja Kayu, tempat tidur besi, Kursi Besi/Metal sebesar Rp 175.045.000 sehingga saldo per 30 Juni 2025 sebesar Rp 8.217.565.811,-. Akumulasi Penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp 6.793.629.486,- sehingga nilai buku per 30 Juni 2025 sebesar Rp 1.423.936.325,-.

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Rp Nilai Gedung dan Bangunan sebelum penyusutan per Januari 2025 Dan Juni 2025 adalah Rp 0,- dan Rp 48.900,340,295,-
48.900.340.295,-

Tabel 10
Mutasi Gedung dan Bangunan 2025

URAIAN	Realisasi
Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025	48.900.340.295
Mutasi tambah :	0
Penataan Ruang Rapat dan Ruang Kepala	0
Pemasangan Pagar Duri	0
Mutasi kurang :	0
Pagar permanen	0
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0
koreksi pencatatan :	0
Saldo Per 30 Juni 2025	48.900.340.295
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.242.181.655)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	44.658.158.640

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada Gedung dan Bangunan pada periode per 30 Juni 2025-.

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Saldo Aset Tetap Lainnya per 1 Januari 2025 Dan 30 Juni 2025 *Rp 7.983.150,-* adalah Rp 7.983.150,- dan Rp 7,983,150,-. Aset Tetap Lainnya terdiri monografi berupa Buku untuk Perpustakaan Pojok Pintar di Balai Diklat Hukum Jawa Tengah.

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 1 Januari 2025 Dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing Rp 6.793.629.486,- dan Rp 4.242.181.655,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan *Rp 11.035.811.141*

selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

*Tabel 11
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2025*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	323.737.178.000	-	323.737.178.000
Peralatan dan Mesin	8.217.565.811	6.793.629.486	1.423.936.325
Gedung dan Bangunan	48.900.340.295	4.242.181.655	44.658.158.640
Aset Tetap Lainnya	7.983.150	-	7.983.150
Jumlah	380.863.067.256	11.035.811.141	369.827.256.115

C.3 Aset lainnya

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Saldo aset Tak Berwujud berupa Software per 1 Januari 2025 Dan Rp 140.750.000,- 30 Juni 2025 adalah Rp 0,- dan Rp 140.750.000,-.

*Tabel 12
Mutasi Aset Tak Berwujud 2025*

URAIAN	Saldo
Nilai Aset Tak Berwujud 30 Juni 2025	140.750.000
Mutasi tambah :	
Software Komputer	
Aset Tak Berwujud Lainnya	0
Mutasi kurang :	
Aset Tak Berwujud Lainnya	0
Nilai Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025	140.750.000

Aset Tak Berwujud terdiri atas :

1. Pembelian Software Aplikasi BLC (Badiklat Learning Center) sebesar Rp 140,750,000,-

C.3.2 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Rp 39.105.126,-

Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan berupa Aset Tetap yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas 1 Januari 2025 Dan 30 Juni 2025 adalah Rp 0,- dan Rp 39.105.126,-

*Tabel 13
Mutasi Aset Tetap yang tidak digunakan
Dalam operasi pemerintahan 2025*

URAIAN	Saldo
Nilai Aset Per 30 uni 2025	39.105.126
Mutasi tambah :	
Alat Rumah Tangga	0
Alat Kedokteran	0
Komputer	0
Mutasi kurang :	
Mutasi Kurang	0
Nilai Aset per 30 Jni 2025	39.105.126

C.3.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp 167.414.626,-

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 1 Januari 2025 Dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing Rp 39.105.126 Dan Rp 128.312.500,-. Akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya merupakan kontra akun Aset Lain-lain yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lain-lain.

Tabel 14
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 2025

Aset Tetap	Nilai Perolehan	kumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	140.750.000		140.750.000
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	39.105.126		39.105.126
Akumulasi Penyusutan	(Rp167.417.626)	-	167.417.626
Jumlah	12.437.500	0	12.437.500

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp 185.899.580,- Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 1 Januari 2025 Dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 185.899.580,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

C.4.2. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp 185.899.580,- Nilai Utang yang Belum Ditagihkan per 1 Januari 2025 Dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp185.899.580,-. Kewajiban yang belum ditagihkan merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

C.4.3. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp 48.000.000,-
Uang Muka dari KPPN 1 Januari 2025 Dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 48.000.000,-

C.5. Ekuitas

Ekuitas Rp 369.665.414.335,-
Ekuitas per 1 Januari 2025 Dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 369.665.414.335,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.2. Beban Operasional

D.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp 1.102.483.830,-
Jumlah Beban Pegawai per 1 Januari 2025 Dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 1.102.483.830,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS).

D.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp 53.048.140,-
Jumlah Beban Persediaan per 1 Januari 2025 Dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- Dan Rp 53.048.140,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

D.2.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp 1.833.508.937,- Jumlah Beban Barang dan Jasa per 1 Januari 2025 Dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 1.833.508.937,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp 291.894.723,- Beban Pemeliharaan per 1 Januari 2025 Dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 291.894.723,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

D.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp 519.470.687,- Beban Perjalanan Dinas per 1 Januari 2025 Dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 519.470.687,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

D.2.6. Beban Barang Untuk Diserahkan Masyarakat

Beban barang Untuk Diserahkan Masyarakat Rp 0,- Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 1 Januari 2025 Dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-

D.2.7. Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial Rp 0,- Beban Bantuan Sosial per 1 Januari 2025 Dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-

D.2.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 1 Januari 2025 Dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 1.181.681.149,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.2.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp 0) Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar 0 dan Rp 0,-.

D.3. Kegiatan Non Operasional

Surplus / defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp 11.704.868,- Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 sebesar Rp 11.704.868,- adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Kegiatan Non Operasional
30 Juni 2025

URAIAN	2025
Surplus/Defisit Pelepasan Aset penyelesaian Kewajiban Jangka panjang	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional	11.704.868
Beban dari Kegiatan Non Operasional	0
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	11.704.868

D.4. Belanja Sewa

Belanja Sewa Rp 128.980.000,- Realisasi Belanja Sewa sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 128.980.000,-. Adapun Rincian Belanja Sewa dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 9
Rincian Belanja Sewa 2025

URAIAN	Anggaran	Realisasi	%
Sewa Kendaraan Operasional	70.200.000	70.200.000	100,00
Sewa Pengharum Ruangan	9.000.000	-	0,00
Sewa Kendaraan Insidentil	86.400.000	58.780.000	68,03
Jumlah Belanja	165.600.000	128.980.000	77,89

D.5. Belanja Jasa Lainnya

Belanja Jasa Lainnya Rp 22.782.500,- Realisasi Belanja Jasa Lainnya sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 22.782.500,-. Adapun Rincian Belanja Jasa Lainnya dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Belanja Jasa Lainnya 2025

URAIAN	Anggaran	Realisasi	%
Instruktur Senam	9.600.000	300.000	3,13
Jasa Laundry	25.000.000	22.482.500	89,93
Jumlah Belanja	34.600.000	22.782.500	65,85

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp 0,-
0,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO (Rp Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 1 Januari
2025 Dan 30 Juni 2025 adalah sebesar (Rp 0,-) dan (Rp
4,966,843,198,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara
surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan
non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode 1 Januari 2025 Dan
30 Juni 2025.
0,-.

E.4. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Aset Tetap

E.4.1. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp Koreksi atas Reklasifikasi per 1 Januari 2025 Dan 30 Juni 2025
adalah Rp 0,-. Koreksi atas reklasifikasi merupakan koreksi atas
perubahan atas penggunaan aset tetap yang menyebabkan
berubahnya nilai penyusutan aset tersebut dan selanjutnya
menyebabkan perubahan nilai aset tersebut.

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp 0,- Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan pada tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Pada tahun 2025 tidak terdapat koreksi nilai persediaan.

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Rp 0,- Revaluasi Aset merupakan penilaian kembali terhadap harga wajar aset yang dimiliki oleh satuan kerja di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah. Selisih Revaluasi Aset untuk tahun 2024 dan 2025 adalah masing-masing Rp 0,-

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (Rp 83.645.220,-) Nilai Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 Dan 30 Juni 2024 adalah sebesar (Rp 83.645.220,-) dan Rp 868.653,- Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan disebabkan oleh revaluasi nilai.

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain Rp 0,- Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 Dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp Nilai Transaksi Antar Entitas Untuk Periode Yang Berakhir 1 Januari 2025 Dan 30 Juni 2025 Adalah masing-masing Sebesar Rp 374,632,257,533,- 0,- dan Rp 374,632,257,533,-

E.5.1. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)/ Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain/Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DKEL sebesar Rp 13,192,690,212,- sedangkan DDEL sebesar Rp 39,420,788,-

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer keluar

Transfer Masuk/Keluar Rp 0,- Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp0. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp 0,-

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung Rp 0,- Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp 0,-

E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp Nilai Ekuitas pada akhir Januari 2025 dan Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 369,665,414,335,-
369,665,414,335,-

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2. Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jenderal

-

F.3. Pengungkapan Lainnya

F.3.1. Pengungkapan Terkait Penyusunan Laporan Keuangan

Sumber Daya Manusia (SDM) penyusun Laporan Keuangan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah belum sepenuhnya memahami mengenai proses bisnis akuntansi pemerintah berbasis akrual;

F.3.2. Langkah Strategis Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait BMN dan Penyusunan Laporan Keuangan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Agar dapat dilaksanakan kegiatan sosialisasi maupun bimbingan teknis bagi Penyusun Laporan Keuangan modul GLP Sakti sehingga pengetahuan bertambah;
2. Agar dapat dilaksanakan kegiatan sosialisasi maupun bimbingan teknis bagi para operator BMN Sakti sehingga pengetahuannya bertambah;
3. Menghimbau kepada seluruh penanggung jawab unit akuntansi pengguna barang untuk memberikan perhatian terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN;

F.3.3. Informasi Rekening Pemerintah

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah memiliki rekening atas nama BPG 026 BALAI DIKLAT KUMHAM JATENG pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang Pattimura dengan Nomor Rekening : 0083-01-002516-30-0



**CATATAN ATAS
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
HUKUM JAWA TENGAH**

**SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2025**

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
PERIODE SEMESETER I TAHUN ANGGARAN 2025**

I. PENDAHULUAN

I.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(BMN/D);
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 102 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.6/2015;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.06/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.06/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor MHH-05.PL.04.10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI;
18. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan.
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

I.2 Entitas Pelaporan

- Kementerian : Kementerian Hukum Republik Indonesia

- Kode Satker : 693164
- Nama Satker : Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah

- Alamat : Jl. Raya Moch Ihsan, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang

I.3 Periode Laporan

Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2025 ini disusun

berdasarkan transaksi yang terjadi selama Semester I Tahun Anggaran 2025 terhitung mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025

II. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2025 ini merupakan total nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) sebesar **Rp 381,282,465,540,-** (*Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu*) Lima Ratus Empat Puluh Rupiah yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar **Rp 380,902,172,382,-** (*Tiga Ratus Delapan Puluh Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar **Rp 380,293,158,-** (*tiga ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah*).

Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2025 merupakan Laporan Barang Pengguna Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Lampiran kelengkapan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Laporan BMN terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Aset Tak Berwujud;
5. Laporan Penyusutan(Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
6. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
7. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang;
8. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
9. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN;

III. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER 1 JUNI 2025

Nilai BMN per 1 Juni 2025 adalah sebesar **Rp 381,282,465,540,-** (*Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu*) Lima Ratus Empat Puluh Rupiah yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar **Rp 380,902,172,382,-** (*Tiga Ratus Delapan Puluh Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar **Rp 380,293,158,-** (*tiga ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah*).

IV. RINCIAN MUTASI BARANG MILIK NEGARA PADA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Pengguna Semester I per 1 Januari 2025 adalah sebesar **Rp 0,-** (*0 rupiah*), terdapat mutasi tambah sebesar **Rp 71,319,490,-** (*Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) dan mutasi kurang sebesar **Rp 59,699,190,-** (*delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah*) sehingga saldo per 30 Juni 2025 adalah **Rp 11,620,300,-** (*Sembelas Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	0	61,042,855	53,048,140	7,994,715
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	10,276,635	6,651,050	151.000
117119	Persediaan Lainnya	-	-	-	-
117131	Bahan Baku	-	-	-	-
JUMLAH		0	71,319,490	59,699,190	11,620,300

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 1 Januari 2025 sebesar **Rp 0,-**, (*0 rupiah*) tidak terdapat likuidasi masuk sebesar **Rp 323,737,178,000,-** (*Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah rupiah*) sehingga saldo per 30 Juni 2025 adalah **Rp 323,737,178,000,-** (*Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah rupiah*) .

Uraian	Nilai
Saldo per 1 Januari 2025	0
Mutasi tambah :	-
Mutasi kurang :	-
Likuidasi Masuk	323,737,178,000
Akumulasi penyusutan	-
Nilai buku per 31 Desember 2024	323,737,178,000

Catatan untuk tanah:

- Tidak ada catatan

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Pengguna Semester I per 1 Januari 2025 adalah sebesar **Rp 0,- (0 rupiah)** dan terdapat mutasi tambah sebesar **Rp 8,594,859,969,- (Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah)** sehingga saldo per 30 Juni 2025 **Rp 8,594,859,969,- (Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah)**.

Uraian	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Saldo per 1 Januari 2025	0	0	0
Mutasi tambah :	8,217,565,811	377,294,158	8,594,859,969
Mutasi kurang :	-	-	-
Saldo per 30 Juni 2025	8,217,565,811	377,294,158	8,594,859,969
Akumulasi Penyusutan			
Nilai buku per 30 Juni 2025	8,217,565,811	377,294,158	8,594,859,969

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

- 1) Likuidasi masuk (132111)
- 2) Alat Kantor (30501)
- 3) Alat Rumah Tangga (30502)

1) Likuidasi masuk (30103)

Saldo Likuidasi Masuk pada Laporan Barang Pengguna Satker Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah per 30 Juni 2025 sebesar **Rp 8,419,814,969,-** (*Delapan Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari nilai intrakomptabel sebesar **Rp 8,042,520,811,-** (*Delapan Milyar Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah*) dan nilai ekstrakomptabel sebesar **Rp 377,294,158,-** (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).

Likuidasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
100 Saldo Awal	0	0	0
131 Likuidasi Masuk	8,042,520,811	377,294,158	8,419,814,969

2) Alat Kantor (30501)

Saldo Alat Kantor pada Laporan Barang Pengguna Satker Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah per 30 Juni 2025 sebanyak 5 unit dengan nilai **Rp 82,045,000,-** (*Delapan Puluh Dua Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai **Rp 0,-** (*0 rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 5 unit dengan nilai sebesar **Rp 82,045,000,-** (*Delapan Puluh Dua Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar **Rp0,-** (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kantor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
101 Pembelian	82,045,000	0	82,045,000
	-	-	-
	-	-	-
	82,045,000	0	82,045,000

Penjelasan Mutasi Tambah:

- Pembelian Pintu Elektrik (yang Memakai Akses), Lampu Penerangan Jalan

Mutasi Kurang Alat Angkutan Darat Bermotor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
301 Penghapusan	-	-	-
302 Transfer Keluar	-	-	-
	-	-	-

Penjelasan Mutasi Kurang:

- Tidak terdapat mutasi kurang pada Alat Kantor.

3) Alat Rumah Tangga (30502)

Saldo Alat Rumah Tangga pada Laporan Barang Pengguna Satker Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah per 30 Juni 2025 sebanyak 12 unit dengan nilai **Rp 93,000,000,-** (*Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 0 unit dengan nilai **Rp.**

0,- (rupiah), mutasi tambah jumlah barang sebanyak 12 unit dengan nilai sebesar **Rp 93,000,000,-** (nol rupiah) dan mutasi kurang jumlah barang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar **Rp0,-** (nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
100 Saldo Awal	0	-	0
101 Pembelian	93.000.000	-	93.000.000
	93.000.000	-	93.000.000

Penjelasan Mutasi Tambah:

- Pembelian Meja Kerja Kayu, Kursi Besi/Metal.

Mutasi Kurang Alat Angkutan Darat Tak Bermotor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
301 Penghapusan	-	-	-
302 Transfer Keluar	-	-	-
	-	-	-

Penjelasan Mutasi Kurang:

- Tidak terdapat mutasi kurang pada Alat Rumah Tangga.

D. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Pengguna Semester I per 1 Januari 2025 adalah sebesar **Rp 0,-** (0 rupiah) dan terdapat mutasi tambah sebesar **Rp 48,900,340,295,-** (Empat Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah) sehingga saldo per 30 Juni 2025 **Rp 48,900,340,295,-** (Empat Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Saldo per 1 Januari 2025	0	0	0
Mutasi tambah :	48,900,340,295	0	0
Mutasi Kurang :	0	0	0
Saldo per 30 Juni 2025	48.900.340.295		48.900.340.295
Akumulasi penyusutan	4,242,181,655		4,242,181,655
Nilai buku per 30 Juni 2025	44.658.158.640		44.658.158.640

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung Tempat Kerja (40101)

Saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Laporan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah per 30 Juni 2025 adalah **Rp 31,242,856,061,-** (*tiga puluh satu miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam puluh satu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai **Rp 0,-** (*0 rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 5 unit dengan nilai sebesar **Rp 31,242,856,061,-** (*tiga puluh satu miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam puluh satu rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar **Rp0,-** (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Bangunan Gedung Tempat kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Saldo per 1 Januari 2025	0	0	0
131 Likuidasi Masuk	31,242,856,061	0	31,242,856,061
	31,242,856,061		31,242,856,061

2) Bangunan Gedung Tempat Tinggal (40102)

Saldo Bangunan Gedung Tempat Tinggal pada Laporan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah per 30 Juni 2025 adalah **Rp 11,756,971,783,-** (*Sebelas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai **Rp 0,-** (*0 rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 3 unit dengan nilai sebesar **Rp 11,756,971,783,-** (*Sebelas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*) dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar **Rp0,-** (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Bangunan Gedung Tempat Tinggal tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Saldo per 1 Januari 2025	0	0	0
131 Likuidasi Masuk	11,756,971,783	0	11,756,971,783
	11,756,971,783	0	11,756,971,783

Penjelasan Mutasi Tambah:

- Mutasi Tambah dari Likuidasi masuk.

Mutasi kurang Bangunan Gedung Tempat Tinggal tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi		Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-	-

Penjelasan mutasi kurang:

- Tidak terdapat mutasi kurang pada Gedung Tempat Tinggal.

3) Tugu/Tanda Batas (40401)

Saldo Tugu/Tanda Batas pada Laporan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah per 30 Juni 2025 adalah **Rp 5,900,512,451,-** (*Lima Milyar Sembilan Ratus Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai **Rp 0,-** (*0 rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 1 unit dengan nilai sebesar **Rp 5,900,512,451,-** (*Lima Milyar Sembilan Ratus Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Mutasi Tambah Tugu/Tanda Batas tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi		Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
	Saldo per 1 Januari 2025	0	0	0
131	Likuidasi Masuk	5,900,512,451	0	5,900,512,451
		5,900,512,451	0	5,900,512,451

Penjelasan Mutasi Tambah:

- Mutasi Tambah dari Likuidasi masuk

Mutasi kurang Tugu/Tanda Batas tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi		Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)

Penjelasan mutasi kurang:

- Tidak ada mutasi kurang.

E. Aset Tetap Lainnya

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Pengguna Semester I Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah per 1 Januari 2025 adalah sebesar **Rp 0,- (0 rupiah)** dan terdapat mutasi tambah sebesar **Rp 7,983,150,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah)** sehingga saldo per 30 Juni 2025 **Rp 7,983,150,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah)**

Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi		Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
131	Likuidasi Masuk	7,983,150	-	7,983,150
		7,983,150	-	7,983,150

Penjelasan Mutasi Tambah:

- Mutasi tambah dari likuidasi masuk.

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi		Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
-	-	-	-	-
		-	-	-

Penjelasan mutasi kurang:

- Tidak terdapat mutasi kurang pada Aset Tetap Lainnya.

F. Software

Saldo Software pada Laporan Barang Pengguna satker Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah per 30 Juni 2025 sebesar **Rp 140.750.000,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**. Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal sebanyak 0 Software dengan nilai **Rp 0,- (nol rupiah)**, dengan mutasi tambah/kurang sebesar **Rp 140.750.000,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**.

Mutasi Tambah Software tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi		Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
	Saldo Awal	0	0	0
131	Likuidasi Masuk	140.750.000	-	140.750.000
		140.750.000	-	140.750.000

Penjelasan mutasi tambah Software

- Mutasi Tambah dari Likuidasi Masuk.

Mutasi Kurang Software tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi		Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-	-

Penjelasan mutasi kurang Software

- Tidak terdapat mutasi kurang pada Software.

Berikut rincian Software Komputer di Lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah :

Satker	Kode Barang	Uraian Barang	NUP	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi
BADIKLAT KUMHAM JATENG	8010101001	<i>Badiklat Learning Center</i>	1	2020	61.500.000	Baik
BADIKLAT KUMHAM JATENG	8010101001	Sistem Informasi Badiklat Kumham Jateng (SILABA)	2	2021	29.500.000	Baik
BADIKLAT KUMHAM JATENG	8010101001	Website resmi Badiklat Kumham Jateng	3	2022	49.750.000	Baik
Total					140.750.000	

G. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan

Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan pada Laporan Barang Pengguna satker Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah per 30 Juni 2025 sebesar **Rp 42,104,126,-** (*Empat Puluh Dua Juta Seratus Empat Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Awal sebanyak 0 barang dengan nilai **Rp 0,-** (*nol rupiah*), dengan mutasi tambah/ sebesar **Rp 42,104,126,-** (*Empat Puluh Dua Juta Seratus Empat Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah*).

Uraian Jenis Transaksi		Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
	Saldo Awal	0	0	0
132	Likuidasi Masuk Henti Guna	39,105,126	2,999,000	42,104,126
	Saldo Per 30 Juni 2025	39,105,126	2,999,000	42,104,126

I. INFORMASI PENTING LAINNYA (PENGUNGKAPAN LAINNYA)

Tidak ada informasi penting lainnya yang dapat diungkapkan pada Catatan atas Laporan Barang Milik Negara Periode Semester I Tahun Anggaran 2025.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 135
SATUAN KERJA : 693164

KEMENTERIAN HUKUM
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH

Tanggal : 04/08/25 10:56 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_fsfp_g_satker

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN							
03	PEMBINAAN HUKUM							
WA	Uraian Program Tidak Ada							
7149	Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah	24,015,339,000	25,358,575,000	3,822,738,113	0	3,822,738,113	15.07	21,535,836,887
	JUMLAH PROGRAM Uraian Program Tidak Ada	24,015,339,000	25,358,575,000	3,822,738,113	0	3,822,738,113	15.07	21,535,836,887
	JUMLAH SUBFUNGSI PEMBINAAN HUKUM	24,015,339,000	25,358,575,000	3,822,738,113	0	3,822,738,113	15.07	21,535,836,887
	JUMLAH FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	24,015,339,000	25,358,575,000	3,822,738,113	0	3,822,738,113	15.07	21,535,836,887

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 135
ESELON I : 13
WILAYAH/PROVINSI : 0300
SATUAN KERJA : 693164
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
JAWA TENGAH
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 04/08/25 10:55 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 4/8/25 8:45 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	762,062,000	1,248,306,000	751,882,700	0	751,882,700	60.23	496,423,300
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18,000	20,000	11,956	0	11,956	59.78	8,044
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	36,963,000	78,491,000	45,678,150	0	45,678,150	58.2	32,812,850
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	15,189,000	26,028,000	15,861,860	0	15,861,860	60.94	10,166,140
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	40,320,000	40,320,000	23,040,000	0	23,040,000	57.14	17,280,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	35,201,000	39,872,000	20,864,000	0	20,864,000	52.33	19,008,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,558,000	9,922,000	8,641,964	0	8,641,964	87.1	1,280,036
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	41,757,000	67,568,000	40,627,620	0	40,627,620	60.13	26,940,380
511129	Belanja Uang Makan PNS	196,560,000	235,224,000	80,056,000	0	80,056,000	34.03	155,168,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	23,687,000	43,210,000	27,570,000	0	27,570,000	63.8	15,640,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1,153,315,000	1,788,961,000	1,014,234,250	0	1,014,234,250	56.69	774,726,750
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	93,000,000	0	0	0	0	93,000,000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	114,000,000	0	0	0	0	114,000,000
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	49,545,000	49,545,000	0	0	0	0	49,545,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	49,545,000	49,545,000	0	0	0	0	49,545,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	1,202,860,000	1,952,506,000	1,014,234,250	0	1,014,234,250	51.95	938,271,750
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,506,445,000	1,517,200,000	665,531,121	0	665,531,121	43.87	851,668,879
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,400,000	2,400,000	267,000	0	267,000	11.12	2,133,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	82,560,000	82,560,000	34,400,000	0	34,400,000	41.67	48,160,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	56,700,000	123,200,000	70,414,544	0	70,414,544	57.15	52,785,456
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,648,105,000	1,725,360,000	770,612,665	0	770,612,665	44.66	954,747,335
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	3,897,346,000	3,650,888,000	95,271,480	0	95,271,480	2.61	3,555,616,520
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	6,064,000	6,064,000	650,000	0	650,000	10.72	5,414,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	123,940,000	723,159,000	427,485,617	0	427,485,617	59.11	295,673,383
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	4,027,350,000	4,380,111,000	523,407,097	0	523,407,097	11.95	3,856,703,903
5218	Belanja Barang Persediaan							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 135
ESELON I : 13
WILAYAH/PROVINSI : 0300
SATUAN KERJA : 693164
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
JAWA TENGAH
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/08/25 10:55 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 4/8/25 8:45 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	90,000,000	73,000,000	49,193,475	0	49,193,475	67.39	23,806,525
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	90,000,000	73,000,000	49,193,475	0	49,193,475	67.39	23,806,525
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	360,000,000	270,000,000	115,636,034	0	115,636,034	42.83	154,363,966
522112	Belanja Langganan Telepon	12,000,000	12,000,000	4,131,047	0	4,131,047	34.43	7,868,953
522113	Belanja Langganan Air	12,000,000	12,000,000	4,010,050	0	4,010,050	33.42	7,989,950
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	217,200,000	217,200,000	198,200,000	0	198,200,000	91.25	19,000,000
522141	Belanja Sewa	147,800,000	198,600,000	128,980,000	0	128,980,000	64.94	69,620,000
522151	Belanja Jasa Profesi	3,231,400,000	3,250,600,000	0	0	0	0	3,250,600,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	82,400,000	82,400,000	22,782,500	0	22,782,500	27.65	59,617,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	4,062,800,000	4,042,800,000	473,739,631	0	473,739,631	11.72	3,569,060,369
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	182,310,000	401,820,000	247,730,094	0	247,730,094	61.65	154,089,906
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	10,000,000	10,000,000	6,829,635	0	6,829,635	68.3	3,170,365
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	235,390,000	237,430,000	37,513,579	0	37,513,579	15.8	199,916,421
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10,000,000	10,000,000	4,962,000	0	4,962,000	49.62	5,038,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	437,700,000	659,250,000	297,035,308	0	297,035,308	45.06	362,214,692
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,606,624,000	7,563,928,000	513,770,687	0	513,770,687	6.79	7,050,157,313
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150,900,000	144,900,000	5,700,000	0	5,700,000	3.93	139,200,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	27,720,000	0	0	0	0	27,720,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	7,757,524,000	7,736,548,000	519,470,687	0	519,470,687	6.71	7,217,077,313
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	18,023,479,000	18,617,069,000	2,633,458,863	0	2,633,458,863	14.15	15,983,610,137
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	316,668,000	316,668,000	175,045,000	0	175,045,000	55.28	141,623,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	316,668,000	316,668,000	175,045,000	0	175,045,000	55.28	141,623,000
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,472,332,000	4,472,332,000	0	0	0	0	4,472,332,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	4,472,332,000	4,472,332,000	0	0	0	0	4,472,332,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	4,789,000,000	4,789,000,000	175,045,000	0	175,045,000	3.66	4,613,955,000
	JUMLAH BELANJA	24,015,339,000	25,358,575,000	3,822,738,113	0	3,822,738,113	15.07	21,535,836,887

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (693164) BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH

Tgl Data : 04/08/25 7:26 AM

Tgl Cetak : 04/08/25 10:47 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	48,000,000	0	48,000,000	0.00
Persediaan	11,620,300	0	11,620,300	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	59,620,300	0	59,620,300	
ASET TETAP				
Tanah	323,737,178,000	0	323,737,178,000	0.00
Peralatan dan Mesin	8,217,565,811	0	8,217,565,811	0.00
Gedung dan Bangunan	48,900,340,295	0	48,900,340,295	0.00
Aset Tetap Lainnya	7,983,150	0	7,983,150	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(11,035,811,141)	0	(11,035,811,141)	0.00
JUMLAH ASET TETAP	369,827,256,115	0	369,827,256,115	
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	140,750,000	0	140,750,000	0.00
Aset Lain-lain	39,105,126	0	39,105,126	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(167,417,626)	0	(167,417,626)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	12,437,500	0	12,437,500	
JUMLAH ASET	369,899,313,915	0	369,899,313,915	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	185,899,580	0	185,899,580	0.00
Uang Muka dari KPPN	48,000,000	0	48,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	233,899,580	0	233,899,580	
JUMLAH KEWAJIBAN	233,899,580	0	233,899,580	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	369,665,414,335	0	369,665,414,335	0.00
JUMLAH EKUITAS	369,665,414,335	0	369,665,414,335	
JUMLAH EKUITAS	369,665,414,335	0	369,665,414,335	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	369,899,313,915	0	369,899,313,915	

Keterangan :

FINAL

Semarang, 4 Agustus 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

RINTO GUNAWAN SITORUS

NIP 198208292008011001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (693164) BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA
TENGAH

Tgl Data : 04/08/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 04/08/25 10:49 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	3,822,738,113
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	15,244,268	0
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	3,539,400
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	11,704,868
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	751,882,700	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11,956	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	45,678,150	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	15,861,860	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	23,040,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	20,864,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	8,641,964	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	40,627,620	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	80,056,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	27,570,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	665,531,121	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	267,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	34,400,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	70,414,544	0
3.0	521211	Belanja Bahan	95,271,480	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	650,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	427,485,617	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	49,193,475	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	115,636,034	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	4,131,047	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	4,010,050	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	198,200,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	128,980,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	22,782,500	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	247,730,094	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6,829,635	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37,513,579	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,962,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	513,770,687	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,700,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175,045,000	0
JUMLAH			3,837,982,381	3,837,982,381

Keterangan :

FINAL

Semarang, 4 Agustus 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

RINTO GUNAWAN SITORUS

198208292008011001

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 ESELON I : (13) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
 SATUAN KERJA : (693164) BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA
 TENGAH

Tgl Data : 04/08/25 7:26 AM

Tgl Cetak : 04/08/25 10:45 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,539,400	0	3,539,400	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,539,400	0	3,539,400	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	3,539,400	0	3,539,400	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,102,483,830	0	1,102,483,830	
Beban Persediaan	53,048,140	0	53,048,140	
Beban Barang dan Jasa	1,833,508,937	0	1,833,508,937	
Beban Pemeliharaan	291,894,723	0	291,894,723	
Beban Perjalanan Dinas	519,470,687	0	519,470,687	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 ESELON I : (13) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
 SATUAN KERJA : (693164) BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA
 TENGAH

Tgl Data : 04/08/25 7:26 AM

Tgl Cetak : 04/08/25 10:45 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,181,681,149	0	1,181,681,149	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	4,982,087,466	0	4,982,087,466	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,978,548,066)	0	(4,978,548,066)	()
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	11,704,868	0	11,704,868	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	11,704,868	0	11,704,868	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	11,704,868	0	11,704,868	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,966,843,198)	0	(4,966,843,198)	()
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,966,843,198)	0	(4,966,843,198)	()

Keterangan :

FINAL

Semarang, 4 Agustus 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

RINTO GUNAWAN SITORUS

NIP 198208292008011001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM 135
ESELON I : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM 13
SATUAN KERJA : BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH 693164

Tgl Data : 04/08/25 7:26 AM
Tgl Cetak : 04/08/25 10:46 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	25,358,575,000	3,822,738,113	(21,535,836,887)	15.07	0	0	0	0
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Semarang, 4 Agustus 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

RINTO GUNAWAN SITORUS
NIP 198208292008011001

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 ESELON I : (13) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
 SATUAN KERJA : (693164) BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA
 TENGAH

Tgl Data : 04/08/25 7:26 AM

Tgl Cetak : 04/08/25 10:42 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,539,400	0	3,539,400	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,539,400	0	3,539,400	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	3,539,400	0	3,539,400	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,102,483,830	0	1,102,483,830	
Beban Persediaan	53,048,140	0	53,048,140	
Beban Barang dan Jasa	1,833,508,937	0	1,833,508,937	
Beban Pemeliharaan	291,894,723	0	291,894,723	
Beban Perjalanan Dinas	519,470,687	0	519,470,687	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 ESELON I : (13) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
 SATUAN KERJA : (693164) BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA
 TENGAH

Tgl Data : 04/08/25 7:26 AM

Tgl Cetak : 04/08/25 10:42 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,181,681,149	0	1,181,681,149	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	4,982,087,466	0	4,982,087,466	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,978,548,066)	0	(4,978,548,066)	()
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	11,704,868	0	11,704,868	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	11,704,868	0	11,704,868	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	11,704,868	0	11,704,868	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,966,843,198)	0	(4,966,843,198)	()
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,966,843,198)	0	(4,966,843,198)	()

Keterangan :

FINAL

Semarang, 4 Agustus 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

RINTO GUNAWAN SITORUS

NIP 198208292008011001